PENGARUH PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB), INVESTASI DAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) TERHADAP KETIMPANGAN PENDAPATAN DI PROVINSI RIAU

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Negeri Padang

VIDI IRWANDA

2018 / 18060051

JURUSAN ILMU EKONOMI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2022

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Skripsi
Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang

PENGARUH PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB), INVESTASI DAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) TERHADAP KETIMPANGAN PENDAPATAN DI PROVINSI RIAU

Nama	: Vidi Irwanda
BP/NIM	: 2018/18060051
Keahlian	: Ekonomi Publik
Jurusan	: Ilmu Ekonomi
Fakultas	: Ekonomi

Padang, 29 Agustus 2022

Tim Penguji :

No	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1.	Ketua	: Dr. Idris, M.Si	1.
2.	Anggota	: Ariusni, SE, M.Si	2.
3	Anggota	: Drs. Alianis, MS	3.

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

PENGARUH PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB), INVESTASI DAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) TERHADAP KETIMPANGAN PENDAPATAN DI PROVINSI RIAU

Nama	: Vidi Irwanda
TM/NIM	: 2018/18060051
Keahlian	: Ekonomi Publik
Jurusan	: Ilmu Ekonomi
Fakultas	: Ekonomi

Padang, September 2022

Mengetahui,
Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi

Dr. Novya Zulfa Riani, SE, M.Si
NIP. 19711104 200501 2 001

Disetujui dan Disahkan Oleh,
Pembimbing

Dr. Idris, M.Si
NIP. 19610703 198503 1 005

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama	:	Vidi Irwanda
NIM/TM	:	18060051/2018
Tempat/Tanggal Lahir	:	Muaro Paiti/ 15 November 1997
Jurusan	:	Ilmu Ekonomi
Keahlian	:	Ekonomi Publik
Fakultas	:	Ekonomi
No. HP	:	0852 6400 7961
Judul Skripsi	:	Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Investasi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Riau

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis/skripsi saya ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (sarjana), baik di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis/skripsi ini murni gagasan, rumusan, dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis/skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah ditulis atau dipublikasikan kecuali secara eksplisit dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis/skripsi ini Sah apabila telah ditanda tangani Asli oleh Tim Pembimbing, Tim Penguji dan Ketua Jurusan

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh karena karya tulis/skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang telah berlaku di Perguruan Tinggi.

Padang, September 2022

Yang Menyatakan

Vidi Irwanda

18060051

ABSTRAK

Vidi Irwanda (18060051) : Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Investasi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Riau

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Riau, pengaruh investasi terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Riau, dan pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Riau. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang besumber dari studi kepustakaan, artikel atau jurnal dan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau. Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel dengan metode *Fixed Effect Model* (FEM) dari *cross section* 12 Kabupaten/Kota di Provinsi Riau dan *time series* 2016-2021.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Riau, investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Riau, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Riau. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), investasi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Riau.

Dalam upaya mengatasi tingkat ketimpangan di Provinisi Riau pemerintah hendaknya lebih mengoptimalkan dalam mencapai pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), membuat program-program dalam pemerataan investasi dan bersinergi dengan masyarakat untuk mencapai pembangunan manusia.

Kata Kunci: *Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Investasi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Ketimpangan Pendapatan.*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul ”Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Investasi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Riau”. Shalawat dan salam penulis kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan perubahan kepada umat manusia untuk menjadi manusia yang berilmu dan berakhlak mulia seperti saat ini. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini menemui berbagai kendala, namun atas berkat dari Allah SWT serta bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak sehingga kendala-kendala yang dihadapi tersebu dapat diatasi. Maka dari itu penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan kepada Bapak Dr. Idris, M.Si, selaku pembimbing yang telah sabar, tekun, tulus dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran memberikan bimbingan, motivasi, arahan dan saran-saran yang sangat berharga kepada penulis selama menyusun skripsi.

Selanjutnya ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak dr. Idris, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang sekaligus dosen pembimbing akademik dan pembimbing skripsi

penulis yang telah menyediakan fasilitas-fasilitas dan izin dalam menyelesaikan skripsi ini serta sudah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi.

2. Ibu Dr. Novya Zulva Riani, SE, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang dan Bapak Dr. Joan Marta, SE, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan motivasi kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Ibu ariusni, SE, M.Si selaku Dosen Penguji (1) dari Bapak Drs. Alianis, MS selaku Dosen Penguji (2) pada Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan kritik dan saran serta motivasi kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Ilmu Ekonomi yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan studi serta penulisan skripsi.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi yang telah meluangkan banyak waktu dalam memberikan ilmu baik mengenai *soft skill*, organisasi dan bantuan moral sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan penulisan skripsi ini.
6. Bapak Ibu Staff Tata Usaha dan Perpustakaan Fakultas Ekonomi yang telah membantu kelancaran penyelesaian skripsi ini.
7. Teristimewa, terimkasih kepada ayah yang telah bekerja tanpa lelah dan selalu mendoakan tanpa henti. Untuk almarhumah amak yang tidak dapat

melihat Vidi wisuda, namun juga ikut berjuang dalam proses perkuliahan dengan memberikan dukungan moril dan materil. Semoga kelak kita bisa berkumpul lagi di Surga Allah. Terimakasih untuk kepada kedua adik saya Nilam Destinarsih dan Nadim Hibatullah yang telah menghibur sehingga dapat memberikan semangan dalam menyelesaikan skripsi ini.

8. Rekan-rekan seperjuangan Jurusan Ilmu Ekonomi angkatan 2018 tanpa terkecuali.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis sadar bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan sehingga oleh karenanya penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan dimasa yang akan datang. Selanjutnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan tulus penulis ucapkan terimakasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu penulis dan penulisan proposal skripsi ini. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal bagi kita semua.

Padang, September 2022

Penulis,

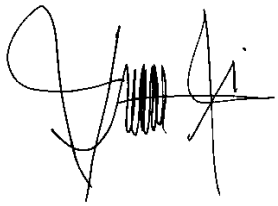

Vidi Irwanda

DAFTAR ISI

ABSTRAK i
KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI v
DAFTAR GAMBAR vii
DAFTAR TABEL viii
DAFTAR LAMPIRAN ix
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 14
C. Tujuan Penelitian 14
D. Manfaat Penelitian 15
BAB II 17
TINJAUAN PUSTAKA 17
A. Kajian Teori 17
B. Pengaruh Antar Variabel 29
C. Penelitian Terdahulu 33
D. Kerangka Konseptual 36
E. Hipotesis 38
BAB III 40
METODOLOGI PENELITIAN 40
A. Pendekatan Penelitian 40
B. Tempat dan Waktu Penelitian 40
C. Jenis dan Sumber Data 40
D. Definisi Operasional 41
E. Teknik Pengumpulan Data 42
F. Teknik Analisis Data Penelitian 43

BAB IV 52
HASIL DAN PEMBAHASAN 52
A. Hasil Penelitian 52
B. Pembahasan 69
BAB V 75
KESIMPULAN DAN SARAN 75
A. Kesimpulan 75
B. Saran 75
DAFTAR PUSTAKA 77
LAMPIRAN 80

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Data *Gini Ratio* Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2016-2021 4
Gambar 2. Kurva Kuznets..... 18
Gambar 3. Koefisien Gini 19
Gambar 4. Kerangka Konseptual 38
Gambar 5. Teori Kuznets U-Terbalik 71

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data *Gini Ratio* Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2016-2021..... 5
Tabel 2. Data Laju Pertumbuhan Produk Regional Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2016-2021 (Dalam Milyar Rupiah)..... 7
Tabel 3. Data Realisasi Investasi Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2016-2021 (Dalam Milyar Rupiah)..... 9
Tabel 4. Data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2016-2021..... 12
Tabel 5. Penelitian Terdahulu..... 33
Tabel 6. Jumlah Penduduk Provinsi Riau..... 53
Tabel 7. Analisis Statistik Deskriptif..... 54
Tabel 8. Hasil Uji *Common Effect Model* (CEM)..... 56
Tabel 9. Hasil Uji *Fixed Effect Model* (FEM)..... 57
Tabel 10. Hasil Uji *Random Effect Model* (REM)..... 59
Tabel 11. Hasil Uji Chow..... 60
Tabel 12. Hasil Uji Hausman..... 61
Tabel 13. Hasil Uji Heteroskedastisitas..... 61
Tabel 14. Hasil Uji Mutikolinearitas..... 62
Tabel 15. Hasil Uji Regresi Data Panel..... 65

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Izin Permohonan Permintaan Data Kepada BPS Provinsi Riau 80
Lampiran 2. Data Gini Ratio Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2016-2021 . 81
Lampiran 3. Data Laju Pertumbuhan Produk Regional Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2016-2021 (Dalam Milyar Rupiah)..... 81
Lampiran 4. Data Realisasi Investasi Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2016-2021 (Dalam Milyar Rupiah)..... 82
Lampiran 5. Data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2016-2021..... 83
Lampiran 6. Analisis Statistik Deskriptif..... 83
Lampiran 7. Hasil Uji *Common Effect Model* (CEM) 84
Lampiran 8. Hasil Uji *Fixed Effect Model* (FEM) 84
Lampiran 9. Hasil Uji *Random Effect Model* (REM) 85
Lampiran 10. Hasil Uji Chow 85
Lampiran 11. Hasil Uji Hausman 86
Lampiran 12. Hasil Uji Heteroskedastisitas..... 86
Lampiran 13. Hasil Uji Mutikolinearitas 86
Lampiran 14. Hasil Uji Regresi Data Panel 87
Lampiran 15. . Uji Durbin Watson (DW) 88

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap negara di dunia memiliki tujuan utama yaitu meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pembangunan ekonomi suatu negara. Pembangunan merupakan suatu proses multidimensional yang melibatkan perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, sikap mental yang sudah terbiasa dan lembaga-lembaga nasional termasuk pula pencepatan atau akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengangguran, ketimpangan dan pemberantasan kemiskinan yang absolut (Todaro dan Smith, 2015).

Keberhasilan pembangunan suatu negara dapat diukur dari pertumbuhan ekonomi dan semakin kecilnya jurang ketimpangan pendapatan antar penduduk, daerah dan antar sektor. Namun, pada kenyataannya pertumbuhan ekonomi yang terjadi disuatu negara tidak sepenuhnya dapat diikuti oleh pemerataan. Ketimpangan yang terjadi karena beberapa daerah mengalami pertumbuhan yang cepat dan beberapa daerah lagi mengalami pertumbuhan yang lambat. Perbedaan kemajuan daerah-daerah tersebut diakibatkan karena kurangnya sumber-sumber yang dimiliki, selain itu juga dipengaruhi oleh investor yang cenderung berinvestasi pada daerah yang telah maju dan memiliki sarana prasarana yang lebih lengkap.

Menurut Kuriniasih (2013) menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap ketimpangan dengan arah yang negatif. Artinya semakin tinggi pertumbuhan ekonomi maka akan berdampak mengecilnya ketimpangan pendapatan antar daerah. Hal ini juga dapat dijelaskan melalui mekanisme pusat pertumbuhan dimana pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat membawa pengaruh bagi daerah lain baik dari sisi positif maupun sisi negatif. Jika pertumbuhan disuatu daerah menyebabkan perbedaan antara ke dua daerah tersebut semakin menyempit berarti terjadi imbas yang baik (positif) karena terjadi proses penetesan ke bawah *(trickling down effect)* sedangkan jika perbedaan antara kedua daerah tersebut semakin jauh berarti terjadi imbas yang kurang baik (negatif) hal ini sesuai dengan teori *polarization effect.*

Salah satu permasalahan pembangunan ekonomi adalah taraf hidup masyarakat yang rendah dengan angka kemiskinan yang semakin bertambah. Angka kemiskinan yang semakin bertambah dikarenakan semakin melebarnya jurang pendapatan antara masyarakat kaya dengan masyarakat miskin sehingga hal ini dapat juga menghambat pertumbuhan ekonomi suatu negara. Ketimpangan pendapatan terjadi karena suatu negara lebih cenderung memprioritaskan pertumbuhan dibandingkan pemerataan.

Ketimpangan merupakan permasalahan yang tidak bisa dihilangkan namun dapat dikurangi hingga tingkat yang dapat diterima dalam proses pertumbuhan ekonomi. Karena itu, ketimpangan akan selalu

terjadi pada masing-masing daerah. Ketimpangan mengacu pada standar hidup yang relatif terhadap masyarakat, karena ketimpangan antar wilayah adalah adanya perbedaan faktor anugerah awal. Perbedaan tersebut yang membuat tingkat pembangunan berbeda-beda di setiap wilayahnya. Sehingga menimbulkan jurang kesejahteraan di wilayah tersebut (Kuncoro, 2010).

Ketimpangan memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positif dari adanya ketimpangan adalah dapat mendorong wilayah lain yang kurang maju untuk bersaing dan meningkatkan pertumbuhannya guna meningkatkan kesejahteraannya. Dan dampak negatif dari ketimpangan yaitu inefisiensi ekonomi, melemahkan stabilitas sosial dan solidaritas, serta ketimpangan yang tinggi pada umumnya dipandang tidak adil (Todaro : 2011).

Pulau Sumatera merupakan bagian dari Indonesia yang memiliki 10 provinsi yaitu Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung dan Kepulauan Riau. Setiap provinsi di pulau Sumatera memiliki tingkat ketimpangan pendapatan yang berbeda. Berikut tingkat ketimpangan pendapatan provinsi di Pulau Sumatera yang terdapat pada tabel *gini ratio*.

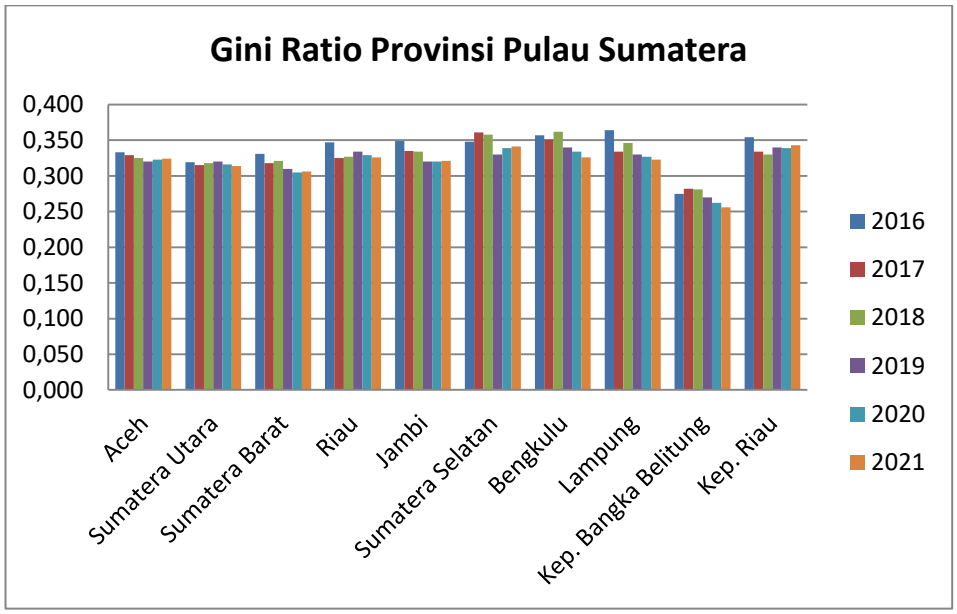

Gambar 1. Data *Gini Ratio* Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2016-2021

Sumber: Badan Pusat Statistik 2022

Gambar 1 diatas menunjukkan perkembangan ketimpangan pendapatan di Pulau Sumatera dari tahun 2016 hingga tahun 2021. Dari gambar terlihat bahwa pada tahun 2016 Provinsi Riau merupakan Provinsi urutan ke 6 tingkat ketimpangannya di Pulau Sumatera setelah Provinsi Lampung, Bengkulu, Kepulauan Riau, Jambi dan Sumatera Selatan. Pada tahun 2017 *gini ratio* Provinsi Riau mengalami penurunan dan mengalami kenaikan lagi 2 tahun berturut-turut. Meskipun begitu *gini ratio* Provinsi Riau tetap dalam kategori sedang dan stabil, namun tidak mengalami penurunan yang signifikan berbeda dari provinsi lain yang sebelumnya mengalami angka ketimpangan lebih tinggi di banding Provinsi Riau.

Provinsi Riau merupakan provinsi yang terdiri 12 Kabupaten/Kota dan mengalami ketimpangan pendapatan sedang. Akan tetapi angka

ketimpangan pendapatan di provinsi Riau merupakan peringkatan dini yang harus segera diatasi sehingga tidak semakin meningkat. Apalagi Provinsi Riau adalah daerah yang memiliki potensi perkembangan ekonomi yang cukup besar.

Ketimpangan pendapatan pada daerah-daerah dapat disebabkan oleh pertumbuhan dan keterbatasan yang dimiliki masing-masing daerah yang berbeda-beda serta pembangunan yang cenderung terpusat pada daerah yang sudah maju salah satunya di Provinsi Riau. Ketidakmerataan ini tentu dapat mengakibatkan kecemburuan sosial antar daerah. Ketimpangan pendapatan di Kabupaten/Kota Provinsi Riau dapat dilihat dengan *gini ratio* tahun 2016-2021 yang disajikan pada tabel 1.

Tabel 1. Data *Gini Ratio* Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2016-2021

No	Kabupaten/ Kota	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Kuantan Singingi	0,344	0,318	0,321	0,317	0,291	0,264
2	Indragiri Hulu	0,337	0,293	0,315	0,295	0,276	0,305
3	Indragiri Hilir	0,301	0,306	0,311	0,303	0,310	0,297
4	Pelalawan	0,319	0,285	0,283	0,280	0,325	0,294
5	Siak	0,311	0,294	0,300	0,298	0,279	0,295
6	Kampar	0,283	0,325	0,293	0,300	0,306	0,281
7	Rokan Hulu	0,310	0,284	0,298	0,306	0,314	0,296
8	Bengkalis	0,286	0,321	0,272	0,288	0,280	0,273
9	Rokan Hilir	0,301	0,282	0,323	0,306	0,281	0,257
10	Kepulauan Meranti	0,284	0,292	0,245	0,302	0,271	0,278
11	Pekanbaru	0,376	0,344	0,351	0,363	0,345	0,391
12	Dumai	0,346	0,321	0,339	0,361	0,360	0,345
RIAU		**0,347**	**0,325**	**0,327**	**0,334**	**0,329**	**0,326**

Sumber: BPS Provinsi Riau 2022

Berdasarkan tabel 1 dapat diperoleh bahwa perkembangan *gini ratio* di Provinsi Riau dari tahun 2016 hingga tahun 2021 cenderung stabil. Dari tabel diatas menunjukkan bahwa *gini ratio* Provinsi Riau berada pada angka 0,347 dalam kategori sedang. Pada tahun selanjutnya dari 2017 hingga 2021 *gini ratio* Provinsi Riau menunjukkan angka yang berfluktuasi.

Ketimpangan pendapatan yang terjadi di Provinsi Riau tentu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut Hadi dalam Syahrullah (2014) ketimpangan pendapatan dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah nilai bersih barang dan jasa-jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode. PDRB sering digunakan sebagai indikator pembangunan. Semakin tinggi PDRB suatu daerah maka semakin besar pula potensi sumber penerimaan daerah tersebut dikarenakan semakin besar pendapatan masyarakat daerah tersebut. Hal ini berarti juga bahwa PDRB dan *gini ratio* memiliki hubungan negatif sehingga semakin tinggi PDRB semakin sejahtera penduduk suatu wilayah. Jika pendapatan tinggi dan merata antar daerah maka ketimpangan pendapatan berkurang. Berikut tabel berikut.

Tabel 2. Data Laju Pertumbuhan Produk Regional Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2016-2021 (Dalam Milyar Rupiah)

No	Kabupaten/ Kota	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Kuantan Singingi	20.669,80	21.574,02	22.579,12	23.613,56	23.843,43	24.689,51
2	Indragiri Hulu	26.742,94	27.807,31	28.778,04	29.866,43	29.829,87	31.176,54
3	Indragiri Hilir	39.697,57	41.491,37	42.988,74	44.774,87	44.926,18	46.921,26
4	Pelalawan	30.654,22	31.899,18	33.056,06	34.338,55	35.110,42	36.538,81
5	Siak	51.557,22	52.029,65	52.595,33	53.366,53	53.311,01	54.543,29
6	Kampar	47.610,21	49.022,01	49.958,84	51.888,83	51.420,47	53.196,38
7	Rokan Hulu	21.792,97	22.965,45	23.925,69	25.101,66	25.482,41	26.752,47
8	Bengkalis	80.577,99	79.189,78	77.848,26	76.377,29	73.856,50	74.229,74
9	Rokan Hilir	45.556,00	46.265,17	46.136,68	46.437,61	45.992,10	46.761,28
10	Kepulauan Meranti	11.451,08	11.827,31	12.304,37	12.629,43	12.683,87	13.008,81
11	Pekanbaru	60.891,07	64.619,26	68.104,59	72.183,56	69.000,14	72.619,08
12	Dumai	21.391,57	22.344,83	23.538,47	24.856,90	24.597,99	26.068,58
RIAU		**458.769,34**	**470.983,51**	**482.064,63**	**495.607,05**	**489.984,31**	**506.457,71**

Sumber: BPS Provinsi Riau 2022

Dari tabel 2 diatas dapat dilihat bahwa perkembangan laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Provinsi Riau tahun 2016-2021. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mengalami kenaikan mulai dari 2016 hingga 2019, namun terjadi penurunan pada tahun 2020 dan 2021.

Dari kenaikan PDRB yang terjadi pada tahun 2016 hingga 2019 harusnya terjadi penurunan *gini ratio* secara berturut-turut selama 3 tahun. Namun, pada kenyataan yang terjadi *gini ratio* hanya terjadi penurunan pada tahun 2017, lalu pada 2018 dan 2019 *gini ratio* mengalami kenaikan kembali hal ini bertolak belakang dengan seharusnya *gini ratio* dengan PDRB yang memiliki hubungan negatif sehingga pada tahun 2018 dan

2019 *gini ratio* mengalami penurunan. Hal ini juga terjadi pada tahun 2020, pada tahun 2020 terjadi penurunan PDRB namun yang terjadi pada *gini ratio* juga menurun padahal seharusnnya dengan terjadinya penurunan pada PDRB akan berdampak pada kenaikan *gini ratio*.

Hasil dari penelitian Kusuma dkk. (2019) menjelaskan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), inflasi, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di D.I Yogyakarta tahun 2011-2017. Peningkatan nilai PDRB akan meningkatkan inflasi, yang berdampak pada penurunan IPM serta meningkatkan ketimpangan pendapatan.

Faktor lain yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan adalah investasi. Investasi merupakan pengeluaran untuk membeli barang-barang modal dan peralatan-peralatan produksi dengan tujuan mengganti dan terutama menambah barang-barang modal perekonomian yang akan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa di masa depan (Sukirno, 2016). Secara umum investasi dibedakan menjadi dua yaitu Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA).

Investasi yang dilakukan oleh pemerintah bertujuan mencari keuntungan dan kelancaran roda ekonomi. Sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki daerah merupakan daya tarik bagi investor (Kusuma, 2019). Investasi dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor ekonomi dan non ekonomi. Faktor ekonomi seperti Produk Domestik Bruto (PDB), pertumbuhan ekonomi dan lain sebagainya, sedangkan

faktor non ekonomi seperti keadaan sosial, budaya dan fasilitas-fasilitas pendukung di masing-masing daerah.

Provinsi Riau merupakan salah satu daerah dengan sektor unggulan pertambangan yang memiliki potensi sebagai daerah maju. Hal ini dikarenakan sumber daya yang dimiliki cukup strategis dan memiliki jumlah yang melimpah. Namun persebaran investasi yang tidak merata di Provinsi Riau ini tentunya akan berdampak pada ketimpangan pendapatan dan penyediaan lapangan pekerjaan di Provinsi Riau. Berikut ini data perkembangan investasi di Provinsi Riau tahun 2018-2021 disajikan pada tabel 3.

Tabel 3. Data Realisasi Investasi Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2016-2021 (Dalam Milyar Rupiah)

No	Kabupaten/ Kota	Investasi (PMDN dan PMA)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Kuantan Singingi	765,056	33,912	822,129	126,931	227,838	628,184
2	Indragiri Hulu	797,432	783,628	1.561,59	2.592,07	3.941,04	1.302,44
3	Indragiri Hilir	372,785	1.189,79	9.534,58	414,062	4.399,70	1.889,21
4	Pelalawan	3.704,69	8.649,25	1.816,54	19.045,07	4.743,40	14.380,74
5	Siak	4.974,10	1.997,48	1.827,89	2.043,25	3.750,73	4.638.57
6	Kampar	474,016	1.078,12	795,525	1.983,50	7.581,33	7.914,80
7	Rokan Hulu	214,196	1.111,34	1.736,23	968,448	911,865	1.994,79
8	Bengkalis	665,698	4.622,92	1.941,74	6.693,78	5.264,56	5.760,94
9	Rokan Hilir	67,811	8,764	166,438	371,435	653,528	269,536

10	Kepulauan Meranti	0	47,987	29,585	17,63	13,569	11,592
11	Pekanbaru	916,24	1.097,22	657,649	1.609,19	5.191,92	4.105,82
12	Dumai	5.563,50	4.398,11	2.006,31	5.937,39	12.961,30	10.153,74
Riau		**18.515,53**	**25.018,53**	**22.896,03**	**41.802,76**	**49.640,78**	**53.050,42**

Sumber: DPMPTSP Provinsi Riau 2022

Dari tabel 3 dapat dilihat bahwa realisasi investasi di Provinsi Riau tahun 2016-2021 selalu mengalami kenaikan. Investasi mengalami kenaikan yang sangat signifikan pada tahun 2019 sebesar 82,57% dibandingkan tahun 2018. Di provinsi Riau investasi cenderung direalisasikan dengan jumlah yang sangat besar pada daerah yang telah maju di setiap tahunnya, hal ini terlihat dari tabel diatas perbedaan angka investasi yang cukup besar antara daerah maju dan daerah tertinggal di Provinsi Riau.

Pada tahun 2016 hingga 2021 investasi di Provinsi Riau selalu meningkat, hal ini seharusnya juga berdampak pada *gini ratio* yang memiliki hubungan positif menurut beberapa hasil penelitian. Namun, dari data yang didapatkan *gini ratio* tahun 2016 hingga 2021 pada kenyataannya mengalami fluktuasi.

Hasil dari penelitian Sutrisna (2021) menjelaskan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Bali. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Bali,

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Bali.

Dalam penelitian Pradnyadewi & Purbadharmaja (2017) menjelaskan bahwa biaya infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh langsung dan signifikan pada ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Bali, sedangkan IPM serta investasi tidak memiliki pengaruh signifikan pada ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Bali. IPM serta biaya infrastruktur memiliki pengaruh pada ketimpangan distribusi pendapatan secara tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali.

Selain PDRB dan investasi, faktor lain yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pembangunan ekonomi dapat dikatakan berhasil apabila suatu daerah dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat secara merata atau lebih dikenal sebagai Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Rendah atau tingginya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) akan berdampak pada tingkat produktivitas penduduk, semakin rendah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) maka tingkat produktivitas penduduk juga akan rendah. Kemudian produktivitas yang rendah akan berpengaruh pada rendahnya pendapatan, begitu pula sebaliknya semakin tinggi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) maka akan semakin tinggi tingkat produktivitas penduduk yang kemudian mendorong tingkat pendapatan menjadi tinggi.

Tabel 4. Data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2016-2021

No	Kabupaten/ Kota	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Kuantan Singingi	68,66	69,53	69,96	70,78	70,31	70,6
2	Indragiri Hulu	68,67	68,97	69,66	70,05	69,83	70,01
3	Indragiri Hilir	65,35	66,17	66,51	66,84	66,54	66,63
4	Pelalawan	70,21	70,59	71,44	71,85	71,56	72,08
5	Siak	72,70	73,18	73,73	74,07	73,68	73,98
6	Kampar	71,39	72,19	72,50	73,15	72,83	73,02
7	Rokan Hulu	67,86	68,67	69,36	69,93	69,38	69,67
8	Bengkalis	71,98	72,27	72,94	73,44	73,46	73,58
9	Rokan Hilir	67,52	67,84	68,73	69,40	69,15	69,34
10	Kepulauan Meranti	63,90	64,70	65,23	65,93	65,50	65,70
11	Pekanbaru	79,69	80,01	80,66	81,35	81,32	81,58
12	Dumai	72,96	73,46	74,06	74,64	74,40	74,75
RIAU		**71,20**	**71,79**	**72,44**	**73,00**	**72,71**	**72,94**

Sumber: BPS Provinsi Riau 2022

Dari tabel 4 dapat dilihat bahwa perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari tahun 2016-2021. Dari tahun 2016 hingga 2019 IPM Provinsi Riau selalu mengalami kenaikan, lalu terjadi penurunan di tahun 2020 dan terjadi kenaikan lagi pada tahun 2021. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Riau menunjukkan kategori IPM menengah atas (70<IPM<80). Hal ini mengindikasikan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Riau tergolong baik.

Dari data IPM Provinsi Riau diatas terlihat bahwa pada 2016 hingga 2019 mengalami kenaikan sehingga hal ini harusnya berdampak

negatif terhadap *gini ratio* dan hal ini sesuai dengan menurut hasil dari beberapa penelitian. Namun, pada kenyataannya *gini ratio* pada tahun 2017 hingga 2019 juga mengalami kenaikan sehingga memunculkan permasalahan, apakah yang menyebabkan *gini ratio* di tahun 2017 hingga 2019 tidak menurun seperti semestinya. Permasalahan ini juga dapat dilihat dari angka IPM Pulau Sumatera, IPM Provinsi Riau selalu tertinggi kedua setelah Kepulauan Riau dari tahun 2016 hingga 2021. Seharusnya dengan tingkat IPM yang tinggi mampu menjadikan Provinsi Riau sebagai salah satu provinsi dengan angka *gini ratio* terendah.

Dalam penelitian Pradnyadewi & Purbadharmaja (2017) menjelaskan IPM serta investasi tidak memiliki pengaruh signifikan pada ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Riau. IPM serta biaya infrastruktur memiliki pengaruh pada ketimpangan distribusi pendapatan secara tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi di Provinsi Riau.

Berdasarkan uraian diatas terkait permasalahan ketimpangan pendapatan di Provinsi Riau. Maka untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan di Provinsi Riau peneliti mengangkat penelitian dengan judul "**Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Investasi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Riau**".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Riau?
2. Bagaimana pengaruh investasi terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Riau?
3. Bagaimana pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Riau?
4. Bagaimana pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), investasi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Riau?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis :

1. Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Riau.
2. Pengaruh investasi terhadap terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Riau.
3. Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Riau.

4. Pengaruh pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), investasi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Riau.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat khususnya bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan sebagai sumber referensi yang dapat memberikan informasi teoritis dan empiris pada pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), investasi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Riau.

2. Manfaat Praktis

   a. Bagi Penulis

      Dengan adanya penelitian ini, dapat memberikan wawasan dan pengetahuan khususnya mengenai pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), investasi, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Riau, serta mampu memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan di jurusan ilmu ekonomi.

   b. Bagi Akademisi

      Penelitian ini dapat dijadikan sumbangan ilmu pengetahuan bagi kalangan akademisi dan referensi bagi peneliti selanjutnya

mengenai pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), investasi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Riau.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), investasi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Riau.

d. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pertimbangan bagi pemerintah mengenai pentingnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), investasi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Riau. Penelitian ini juga dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Ketimpangan Pendapatan

   a. Pengertian Ketimpangan Pendapatan

      Menurut S. Todaro (2012) ketimpangan pendapatan adalah terdapatnya perbedaan pendapatan yang diterima atau dihasilkan oleh masyarakat sehingga mengakibatkan tidak meratanya distribusi pendapatan nasional di antara masyarakat. Ketimpangan pendapatan menurut Kuznest dalam Todaro (2011), pada tahap awal pembangunan ekonomi tingkat ketimpangan pendapatan akan semakin tidak merata, namun pada tahap selanjutnya tingkat ketimpangan pendapatan akan makin merata. Sehingga, Simon kuznet membuat hipotesis adanya kurva "U-Terbalik". Hipotesis tersebut berawal dari pertumbuhan ekonomi yang mulanya menaik pada tingkat kesenjangan pendapatan rendah hingga sampai pada suatu tingkat pertumbuhan ekonomi tertentu menurun.

      Menurut Todaro (2011) menyatakan bahwa ketimpangan pendapatan akan menyebabkan beberapa hal, yaitu :

      1) ketimpangan yang ekstrim akan menyebabkan adanya inefiensi ekonomi.
      2) Ketimpangan pendapatan yang ekstrim akan melemahkan stabilitas sosial dan solidaritas.

3) Ketimpangan pendapatan yang ekstrim umumnya dianggap kurang adil. Kesenjangan pendapatan merupakan perbedaan jumlah pendapatan yang diterima masyarakat yang menyebabkan adanya perbedaan pendapatan yang lebih besar antara golongan dalam masyarakat tersebut.

b. Teori Ketimpangan Pendapatan

1) Teori Kuznets

Teori Ketimpangan pendapatan dimulai dari munculnya suatu hipotesis yang disebut hipotesis "U-terbalik" yang dikemukakan oleh Kuznet tahun 1955. Beberapa ekonom pembangunan mengemukakan bahwa tahapan Kuznets yang menunjukan kenaikan dan kemudian penurunan ketimpangan (Todaro, 2011). Bentuk kurva U terbalik tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

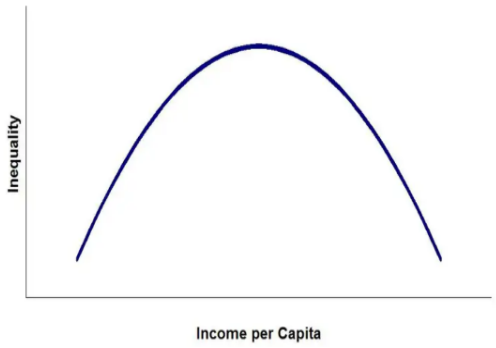

Gambar 2. Kurva Kuznets

Kurva Kuznet pada gambar diatas dapat diketahui bahwa pendapatan akan semakin tidak merata, namun setelah mencapai titik pembangunan tertentu distribusi pendapatan

akan semakin merata. Beberapa tahapan dalam peningkatakan dan penurunan ketimpangan pendapatan yang dikemukakan oleh Kuznet tidak dapat dihindari namun semua tergantung pada proses pembangunan yang dijalankan oleh masing-masing negara (S. Todaro, 2011).

c. Alat Ukur Ketimpangan Pendapatan

1) Koefisien Gini

Koefisien gini merupakan suatu hal yang diperlukan untuk menentukan tingkat ketimpangan pendapatan. Koefisien gini ini terdiri dari nilai 0 hingga 1. Jika koefisien gini=0, maka ketimpangan pendapatan merata sempurna, yang artinya setiap orang sudah menerima pendapatan dengan jumlah yang sama. Sedangkan jika koefisien gini=1, artinya ketimpangan pendapatan timpang sempurna atau dengan kata lain, pendapatan hanya diterima oleh satu orang ataupun satu kelompok saja (BPS, 2022). Koefesien gini merupakan hasil kuantifikasi dari konsep Kurva Lorenz.

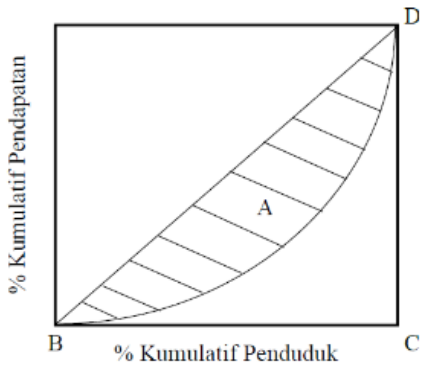

Gambar 3. Koefisien Gini

Dari gambar dapat dilihat bahwa koefisien gini adalah perbandingan antara luas bidang A yang diarsir dengan luas segitiga BCD. Dari gambaran tersebut dapat dikatakan bahwa apabila pendapatan di distribusikan secara merata dengan sempurna, maka semua titik akan terletak pada garis diagonalnya. Artinya, daerah yang diarsir akan bernilai nol. Sebaliknya, apabila hanya satu pihak saja yang menerima seluruh pendapatan, akan luas daerah yang diarsir akan sama dengan luas segitiga, sehingga koefisien gini bernilai satu. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa suatu distribusi pendapatan dikatakan makin merata apabila nilai koefesien gini mendekati nol (0), sedangkan makin tidak merata suatu distrubusi pendapatan maka nilai koefisien gininya makin mendekati satu.

2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

   a. Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

      Menurut Sukirno (2019) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah sebagai seluruh nilai tambah yang timbul dari berbagai kegiatan ekonomi di suatu wilayah, tanpa memperhatikan pemilik atas faktor produksinya apakah milik penduduk wilayah tersebut ataukah milik penduduk wilayah lain.

      PDRB merupakan salah satu indikator penting dalam pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah dalam periode tertentu

(setahun) yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dalam suatu negara atau suatu daerah, ada dua cara dalam penyajian PDRB, yaitu atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan.

1) PDRB atas dasar harga berlaku menunjukan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan dan digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi dan struktur daerah ekonomi suatu daerah.
2) PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut dapat dihitung menggunakan harga barang yanng berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar dan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun.

b. Kegunaan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator ekonomi makro yang dapat menunjukan kondisi perekonomian pada suatu wilayah. Menurut Tarigan (2015) manfaat yang dapat diperoleh dari data ini antara lain adalah :

1) PDRB harga berlaku (nominal) menunjukan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah.
2) PDRB harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap katagori dari tahun ketahun.

3) Distribusi PDRB harga berlaku munurut lapangan usaha menunjukan stuktur perekonomian atau peranan setiap katagori ekonomi suatu wilayah.
4) PDRB perkapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi perkapita penduduk suatu negara.

3. Investasi

a. Pengertian Investasi

Investasi merupakan pengeluaran untuk membeli barang-barang modal dan peralatan-peralatan produksi dengan tujuan mengganti dan terutama menambah barang-barang modal perekonomian yang akan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa di masa depan (Sukirno, 2016).

Secara umum investasi di Indonesia dibedakan menjadi dua macam yaitu (Widjaya, 2005) :

1) Modal Dalam Negeri adalah bagian dari kekayaan masyarakat Indonesia termasuk hak-hak dan benda-benda, baik yang dimiliki oleh negara maupun swasta nasional atau swasta asing yang berdomisili di Indonesia. Penanaman Modal diatur di dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2005 tentang Penanaman Modal. Penanaman Modal Dalam Negeri dapat dilakukan oleh perseorangan WNI, badan usaha Negeri, dan pemerintah

Negeri yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.

2) Penanaman Modal di Indonesia diatur dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal).

b. Teori Investasi

Di bawah ini merupakan teori-teori tentang investasi, antara lain (Lincolin, 2010) :

1) Teori Neo Klasik

Klasik menekankan pentingnya tabungan sebagai sumber investasi. Investasi dipandang sebagai salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Semakin cepat perkembangan investasi ketimbang laju pertumbuhan penduduk, maka semakin cepat perkembangan volume stok kapital rata-rata per tenaga kerja. Makin tinggi rasio kapital per tenaga kerja cenderung makin tinggi kapasitas produksi per tenaga kerja. Tokoh Neo Klasik, Sollow dan Swan memusatkan

perhatiannya pada bagaimana pertumbuhan penduduk, akumulasi capital, kemajuan teknologi dan output saling berinteraksi dalam proses pertumbuhan ekonomi.

2) Teori Keynes

Teori investasi Keynes berkaitan dengan apakah proyek pembangunan modal atau investasi layak untuk dilakukan atau tidak. Teknik untuk mengetahui apakah suatu proyek itu menguntungkan atau tidak, yaitu dengan membandingkan profitabilitas relatif proyek-proyek dengan mendiskontir hasil-hasil di masa depan.

3) Teori Harrod-Domar

Harrod-Domar mempertahankan pendapat dari para ahli ekonomi sebelumnya yang merupakan gabungan dari pendapat kaum klasik dan Keynes, beliau menekankan peranan pertumbuhan modal dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi.

Teori Harrod-Domar memandang bahwa pembentukan modal dianggap sebagai pengeluaran yang akan menambah kemampuan suatu perekonomian untuk menghasilkan barang dan atau jasa, maupun sebagai pengeluaran yang akan menambah permintaan efektif seluruh masyarakat. Dimana apabila pada suatu masa tertentu dilakukan sejumlah pembentukan modal, maka pada masa berikutnya

perekonomian tersebut mempunyai kemapuan untuk menghasilkan barang-barang dan jasa yang lebih besar.

c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Investasi

Menurut Rowland dalam Yuliana (2021:24), Terdapat lima faktor yang mempengaruhi jumlah realisasi investasi, antara lain:

1) Potensi dan karakteristik suatu daerah.
2) Budaya masyarakat.
3) Pemanfaatan era otonomi daerah secara proposional.
4) Peta politik daerah dan nasional.
5) Kecermatan pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan lokal dan peraturan daerah yang menciptakan iklim yang kondusif bagi dunia bisnis dan investasi.

4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

a. Pengertian Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Menurut Todaro (2011) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indeks yang mengukur pencapaian pembangunan sosial ekonomi suatu daerah atau negara, yang mengombinasikan pencapaian di bidang pendidikan, kesehatan dan pendapatan rill perkapita yang disesuaikan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) biasa digunakan untuk mengklasifikasikan sebuah negara adalah maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur dari kebjiaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup.

United Nations Development Programme (UNDP) mendefinisikan pembangunan manusia sebagai "*a process of enlarging peoples choice*" yang berarti suatu proses untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi manusia. Pilihan yang terpenting adalah untuk berumur panjang dan sehat, untuk berilmu pengetahuan, dan untuk mempunyai akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan agar dapat hidup secara layak (Setiawan & Hakim, 2013).

Fokus dari pembangunan suatu negara ialah manusia, karena manusia merupakan aset negara yang sangat berharga. Definisi pembangunan manusia tersebut pada dasarnya mencakup dimensi pembangunan yang sangat luas. Dalam konsep pembangunan manusia, pembangunan seharusnya dianalisis serta dipahami dari sisi manusianya, bukan hanya dari sisi pertumbuhan ekonominya.

Menurut Jhingan (2018) mengemukakan bahwa ada 5 cara dalam pengembangan sumber daya manusia yakni:

1) Fasilitas dan pelayanan kesehatan, mencakup semua pengeluaran yang mempengaruhi harapan hidup, kekuatan dan stamina, tenaga serta vitalitas rakyat.
2) Latihan jabatan, termasuk magang model lama yang diorganisasikan oleh suatu perusahaan.
3) Pendidikan yang diorganisasikan secara formal.

4) Program studi bagi orang dewasa yang tidak diorganisasikan oleh perusahaan (khususnya pada pertanian).
5) Migrasi perorangan dan keluarga untuk menyesuaikan diri dengan kesempatan kerja yang selalu berubah.

Sebagaimana laporan *United Nations Development Programme* (UNDP) dasar pemikiran konsep pembangunan manusia meliputi aspek-aspek sebagai berikut (Darnawaty & Purnamasari, 2019):

1) Pembangunan harus lebih mengutamakan penduduk sebagai pusat perhatian.
2) Pembangunan dimaksudkan untuk memperbesar pilihan bagi penduduk, bukan hanya untuk meningkatkan pendapatan mereka saja. Oleh karena itu, konsep pembangunan manusia harus berpusat pada penduduk yang secara komprehensif dan bukan hanya pada aspek ekonominya semata.
3) Pembangunan manusia bukan hanya memperhatikan pada upaya meningkatkan kemampuan/kapasitas manusia, tetapi juga harus melihat pada upaya memanfaatkan kemampuan/kapasitas manusia itu sendiri secara optimal.
4) Pembangunan manusia didukung oleh empat pilar pokok, yaitu: produktifitas, pemerataan, kesinambungan dan pemberdayaan.

b. Komponen yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM atau *Human Development Index* sebagai ukuran kinerja pembangunan secara keseluruhan dibentuk melalui tiga komponen dasar, yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan yang layak, dan standar hidup layak. Komponen umur panjang dan sehat dipresentasikan oleh indikator angka harapan hidup, komponen pengetahuan dipersentasikan oleh indikator angka melek huruf dan rata-rata lamanya sekolah, sementara standar hidup yang layak dipersentasikan oleh indikator kemampuan daya beli (BPS, 2017).

Harapan hidup merupakan perkiraan jumlah tahun hidup dari individu yang berdiam di suatu wilayah. Melek huruf didefinisikan sebagai kemampuan untuk mengidentiikasi mengerti, menerjemahkan, membuat, mengomunikasikan dan mengolah isi dari rangkaian teks yang terdapat pada tulisan. Sedangkan pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan atau penelitian. Sementara standar hidup layak menunjuk pada kualitas dan kuantitas barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia bagi seseorang yang biasanya diukur oleh pendapatan nyata per orang (Anggadini, 2015).

c. Manfaat Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Adapun manfaat indeks pembangunan manusia antara lain adalah (Bappeda, 2019) :

1) IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia.
2) IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara.
3) Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentu Dana Alokasi Umum (DAU).

B. Pengaruh Antar Variabel

1. Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Ketimpangan Pendapatan

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) baik secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan suatu daerah. Menurut Haris (2014) ketimpangan yang terjadi pada negara sedang berkembang relatif lebih tinggi karena pada waktu proses pembangunan baru dimulai, kesempatan dan peluang pembangunan yang ada umumnya dimanfaatkan oleh daerah-daerah yang kondisi pembangunannya sudah lebih baik sedangkan daerah yang masih terbelakang tidak mampu memanfaatkan peluang ini karena keterbatasan prasarana dan sarana serta rendahnya kualitas

sumber daya manusia. Oleh sebab itulah, pertumbuhan ekonomi cenderung lebih cepat di daerah dengan kondisi yang lebih baik, sedangkan daerah yang terbelakang tidak banyak mengalami kemajuan.

Dalam penelitian yang telah dilakukan Kuznets, menyimpulkan bahwa korelasi pertumbuhan dan ketimpangan sangat kuat, pada permulaannya pertumbuhan ekonomi akan menyebabkan peningkatan ketimpangan yang disebabkan belum meratanya distribusi pendapatan, namun setelah tahapan yang lebih lanjut pemerataan akan semakin tercapai kemudian tingkat ketimpangan akan mengalami penurunan. Kuznets menggambarkan pola peningkatan dan penurunan tersebut dengan metode U terbalik yang Kuznets ciptakan setelah meneliti ketimpangan pendapatan diberbagai negara.

2. Pengaruh Investasi terhadap Ketimpangan Pendapatan

Menurut Myrdal dalam Jhingan (2010) investasi cenderung menambah ketidakmerataan. Pada daerah-daerah yang sedang berkembang, permintaan barang dan jasa akan mendorong naiknya investasi, yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan. Sebaliknya di daerah-daerah yang kurang berkembang, permintaan akan investasi rendah karena pendapatan masyarakat yang rendah. Selain itu, investasi khususnya investasi swasta lebih banyak ditentukan oleh kekuatan pasar. Dalam hal ini, kekuatan yang berperan banyak dalam menarik investasi swasta ke suatu daerah adalah

keuntungan lokasi yang dimiliki oleh suatu daerah. Perbedaan inilah yang akan menyebabkan ketimpangan antar wilayah menjadi semakin melebar.

Menurut teori Harrod-Domar menjelaskan bahwa pembentukan modal/investasi merupakan faktor penting yang menentukan pertumbuhan ekonomi. Dalam teorinya, Harrod-Domar berpendapat bahwa pengaruh investasi pada pertumbuhan ekonomi dalam perspektif jangka waktu yang lebih panjang. Dapat disimpulkan yakni investasi akan berpengaruh secara langsung ataupun tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi, kemudian dengan adanya peningkatan atau penurunan investasi maka pertumbuhan ekonomi juga akan mengalami peniingkatan atau penurunan, seiring dengan peningkatan atau penurunan pertumbuhan tersebut maka akan berpengaruh pada ketimpangan pembangunan. Peningkatan atau penurunan investasi yang saling berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu faktor pemicu ketimpangan pendapatan antar daerah (Todaro, 2013).

3. Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Ketimpangan Pendapatan

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indeks yang mengukur pencapaian pembangunan sosial ekonomi suatu daerah atau negara, yang mengombinasikan pencapaian di bidang pendidikan, kesehatan dan pendapatan rill perkapita yang disesuaikan Todaro

(2011). Menurut Becker & Luis (2007) peran pendidikan formal dalam menunjang pertumbuhan ekonomi menyatakan bahwa semakin tinggi pendidikan formal yang diperoleh, maka produktivitas tenaga kerja akan semakin tinggi pula. Hal tersebut sesuai dengan teori *human capital*, yaitu bahwa pendidikan memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan akan mengurangi ketimpangan pendapatan karena pendidikan berperan dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Teori ini menganggap pertumbuhan penduduk ditentukan oleh produktivitas perorangan. Jika setiap orang memiliki pendapatan yang lebih tinggi karena pendidikannya lebih tinggi, maka pertumbuhan ekonomi penduduk dapat ditunjang, dengan adanya pertumbuhan ekonomi baik secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan.

Setiap wilayah mempunyai tingkatakan pembangunan yang berbeda-beda maka dari itu dapat membuat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki keterkaitan dengan ketimpangan pendapatan Pradnyadewi & Purbadharmaja (2017). Tinggi rendahnya IPM dapat berdampak pada tatanan produktivitas penduduk. Apabila Indeks Pembangunan Manusia (IPM) suatu daerah rendah maka akan berdampak pada rendahnya tingkat produktivitas penduduk, begitu juga sebaliknya semakin tinggi IPM maka akan semakin tinggi tatanan produktivitas penduduk sehingga akan membuat tingkat pendapatan menjadi semakin tinggi.

C. Penelitian Terdahulu

Berikut ini merupakan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan variabel yang diteliti:

Tabel 5. Penelitian Terdahulu

No	Peneliti dan Tahun	Variabel	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1	Rengg Hadi Wijaya, dkk. (2017)	Analisis Pengaruh Pendapatan Per Kapita Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Provinsi Jawa Barat	Model gini rasio menunjukkan bahwa pendapatan per kapita berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Jawa Barat.	Menggunakan data sekunder	Objek penelitiannya ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Barat.
2	Ni Putu Sri Puspita Yanthi dan I Ketut Sutrisna (2021)	Pengaruh IPM dan PMDN Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Kabupaten /Kota Provinsi Bali	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali, sedangkan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali. Indeks	Jenis penelitian kuantitatif.	a. Objek penelitiannya Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. b. Data dikumpulkan melalui observasi. c. Analisis

			Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Bali, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Bali.		yang digunakan yaitu analisis jalur.
3	Kusuma, dkk. (2019)	Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Inflasi, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Daerah Istimewa Yogyakarta	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), inflasi, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di D.I Yogyakarta tahun 2011-2017. Peningkatan nilai PDRB akan meningkatkan inflasi, yang berdampak pada penurunan IPM	a. Menggunakan data sekunder. b. Jenis penelitian kuantitatif	a. Objek penelitiannya Ketimpangan Pendapatan di Daerah Istimewa Yogyakarta

			dan pada akhirnya akan meningkatkan ketimpangan pendapatan.		
4	Pradnyadewi & Purbadharmaja (2017)	Pengaruh IPM, Biaya Infrastruktur, Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Provinsi Bali	Biaya infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh langsung dan signifikan pada ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Bali, sedangkan IPM serta investasi tidak memiliki pengaruh signifikan pada ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Bali. IPM serta biaya infrastruktur memiliki pengaruh pada ketimpangan distribusi pendapatan secara tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali.	Penelitian yang dilakukan berbentuk kuantitaif dan bersifat asosiatif	a. Metode pengumpulan data observasi. b. Objek penelitian Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Provinsi Bali
5	Rosa & Sovita (2016)	Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Ketimpan	Secara simultan faktor PDRB per kapita, penduduk, TPT dan derajat desentralisasi fiskal	a. Jenis penelitian kuantitatif b. Menggunakan	a. Objek penelitian ketimpangan distribusi

		gan Distribusi Pendapatan di Pulau Jawa	berpengaruh positif signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di pulau Jawa	data sekunder	pendapatan

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penelitian merupakan gambaran arah penelitian. Dalam penelitian ini, kerangka konseptual yang tersusun adalah distribusi pendapatan yang dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu PDRB, Investasi dan IPM.

1. Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Ketimpangan Pendapatan

   Variabel PDRB dipilih karena perbedaan perolehan PDRB menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau cukup besar, namun persebaran PDRB di Kabupaten/Kota di Provinsi Riau dapat dikatakan belum terdistribusi secara merata. Hal tersebut dapat menyebabkan ketimpangan yang berbeda setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Riau. Meskipun demikian, ketimpangan di Provinsi Riau masih tergolong dalam kategori sedang yang harus diatasi sebelum terjadinya ketimpangan dalam kategori tinggi di Provinsi Riau. Menurut Kuznets pada tahap awal pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan cenderung memburuk dan pada tahap lebih lanjut, distribusi pendapatan semakin membaik. Hasil penelitian yang dilakukan oleh

Sultan & Jamzani (2010) juga menunjukkan bahwa PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.

2. Pengaruh Investasi terhadap Ketimpangan Pendapatan

   Variabel investasi dipilih karena perbedaan nilai investasi yang mencolok antar Kabupaten/Kota di Provinsi Riau. Meningkatnya investasi akan mengakibatkan terjadinya kegiatan-kegiatan produktif dalam hal kesempatan bekerja bagi masyarakat. Dengan meningkatnya kesempatan kerja bagi masyarakat akan mendukung peningkatan pendapatan masyarakat tersebut. Menurut Harrod-Domar yang menerangkan bahwa naiknya investasi di suatu daerah membuat pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendapatan karena adanya kegiatan-kegiatan produktif. Selain berdampak positif, Investasi juga akan menimbulkan ketimpangan pendapatan pada suatu daerah. Myrdal dalam Islami & Nugroho (2018) mengungkapkan bahwa investasi akan menyebabkan terjadinya ketimpangan pada suatu daerah apabila tidak semua Kabupaten/Kota menjadi sasaran investasi. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni et al, (2014) juga menunjukkan bahwa investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.

3. Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Ketimpangan Pendapatan

   Variabel IPM dipilih karena nilai IPM antar Kabupaten/Kota di Provinsi Riau berbeda-beda dan menunjukkan kategori IPM menengah

atas (70<IPM<80) yang mengindikasikan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Riau tergolong baik. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki tiga indikator yaitu kesehatan, pendidikan, dan ekonomi masyarakat akan mampu menunjang pertumbuhan ekonomi suatu daerah dan akan mengurangi ketimpangan pendapatan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Becker & Luis (2007) juga menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.

Berdasarkan uraian diatas, kerangka konseptual hubungan antar variabel dalam penelitian ini dapat di gambarkan sebagai berikut :

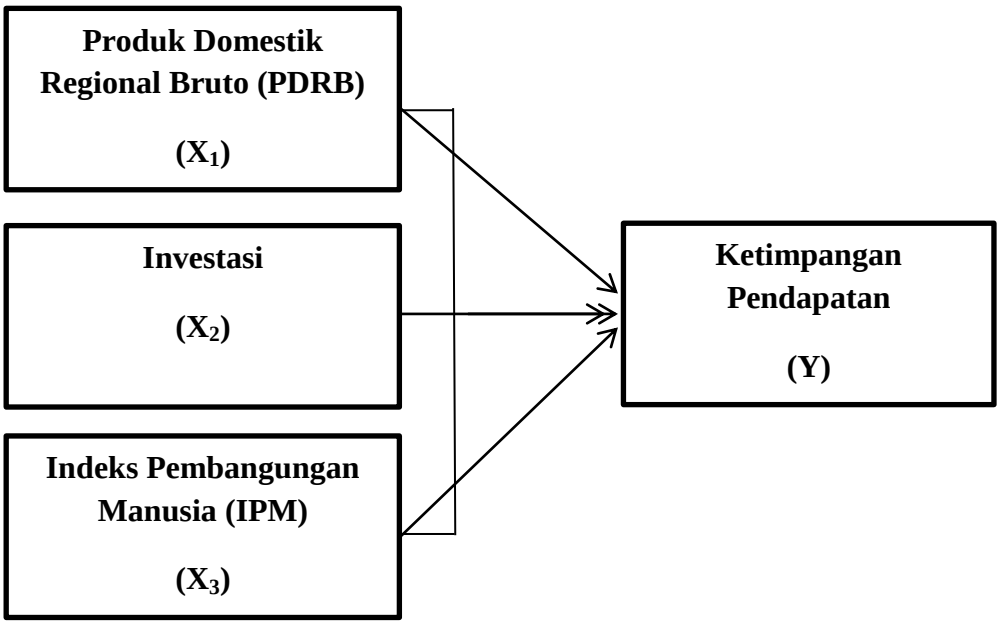

Gambar 4. Kerangka Konseptual

E. Hipotesis

Berdasarkan kajian teori dan penelitian terdahulu, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

1. H_0 = Tidak terdapat pengaruh yang signifikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Riau.

   H_1 = Terdapat pengaruh yang signifikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Riau.

2. H_0 = Tidak terdapat pengaruh yang signifikan investasi terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Riau.

   H_1 = Terdapat pengaruh yang signifikan investasi terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Riau.

3. H_0 = Tidak terdapat pengaruh yang signifikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Riau.

   H_1 = Terdapat pengaruh yang signifikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Riau.

4. H_0 = Tidak terdapat pengaruh yang signifikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), investasi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Riau.

   H_1 = Terdapat pengaruh yang signifikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), investasi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Riau.

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan dari hasil analisis data dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan dalam penelitian ini bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinisi Riau.
2. Berdasarkan dari hasil analisis data dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan dalam penelitian ini bahwa investasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinisi Riau.
3. Berdasarkan dari hasil analisis data dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan dalam penelitian ini bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinisi Riau.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dalam penelitian ini, peneliti mengajukan saran bagi penelitian selanjutnya dan bagi pemerintah terkait:

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu penentu dari ketimpangan pendapatan, maka pemerintah harus lebih mengoptimalkan dalam mencapai pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) agar ketimpangan pendapatan di Provinsi Riau menurun.

2. Investasi tidak merata merupakan penyebab terjadinya ketimpangan pendapatan di Provinsi Riau, maka dari itu perlu intervensi dari pemerintah dengan membuat suatu program-program tertentu pada wilayah yang belum tersentuh oleh pihak investor, agar wilayah tersebut dapat menarik investor untuk berinvestasi.
3. Diharapkan adanya sinergi antara pemerintah dengan masyarakat untuk mencapai pembangunan manusia di Provinsi Riau, dengan memperhatikan tiga indikator dasar Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yaitu pendidikan, kesehatan dan ekonomi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Anggadini, F. (2015). Analisis Pengaruh Angka Harapan Hidup, Angka Melek Huruf, Tingkat Pengangguran Terbuka Dan Pendapatan Domestik Regional Bruto Perkapita Terhadap Kemiskinan Pada Kabupaten/ Kota Di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2010-2013. *E-Jurnal Katalogis*, *3*(7), 40–49.

Arikunto, S. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (R. Cipta (ed.)).

Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.

Bappeda. (2019). *Laporan Akhir Kajian Strategi Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bengkayang*.

Basuki, A. T. (2016). *Analisis Regresi dalam Penelitian Ekonomi & Bisnis: Dilengkapi Aplikasi SPSS & Eviews*. Rajawali Pers.

Becker, G., & Luis, R. (2007). Evolutionary Efficiency and Happiness. *Journal of Political Economy*.

BPS. (2017). *Studi Analisis Kualitas Hidup Masyarakat Menurut Komponen IPM Pada Tingkat Kecamatan*. https://statistik.jakarta.go.id/media/2019/02/2017-Studi-Analisis-IPM-tanpa-lampiran-ok.pdf

BPS. (2022). *Gini Ratio*. Bps.Go.Id.

Darnawaty, F., & Purnamasari, N. (2019). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pertumbuhan Penduduk, Dan Aspek Pendidikan Terhadap Ipm Di Sumatera Utara. *Ekombis Sains: Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Bisnis*, *4*(2), 103–112. https://doi.org/10.24967/ekombis.v4i2.467

Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program IBM SPSS. Edisi 7*. Penerbit Universitas Diponegoro.

Ghozali, I., & Ratmono, D. (2013). *Analisis Multivariat dan Ekonometrika, Teori, Konsep, dan Aplikasi dengan Eviews 8* (B. Penerbit & U. Diponegoro (eds.)).

Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2012). *Dasar–dasar Ekonometrika*. Salemba Empat.

Hadi, R. (2017). Analisis Pengaruh Pendapatan Per Kapita Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di provinsi Jawa Barat. *Prosiding Ilmu Ekonomi*, *3*(2), 154–162.

Haris, M. (2014). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, dan IPM Terhadap Ketimpangan Pendapatan Antar Daerah Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2012. *Jurnal Ilmu Ekonomi Mulawarman (JIEM)*.